

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.¹ Adapun indikator yang umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, diketahui bahwa pada tahun 2019, PDB per kapita Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 15.833.943,4, dan atas dasar harga konstan mencapai Rp. 10.949.243,7. Sedangkan, pada triwulan I-2020 PDB Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 3.922,6 triliun, dan atas dasar harga konstan mencapai Rp. 2.703,1 triliun, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 2,97%. Berdasarkan data tahun 2020 tersebut dapat sedikit memberi gambaran kondisi perekonomian Indonesia yang melambat jika dibandingkan dengan capaian triwulan I-2019 sebesar 5,07%.²

Pada konsep ekonomi variabel pertumbuhan ekonomi biasa dikategorikan dalam sektor riil, berdampingan dengan sektor lain yaitu sektor moneter (sektor keuangan). Adapun sektor keuangan memiliki fungsi dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pada dua aspek yaitu fungsi akumulasi modal (modal fisik

¹Sisilia Kosuma, Sutomo Wim Palar, dan Agnes L. Ch. P. Lopian, *Analisis Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate*, Jurnal, Vol. 16 No. 2, (Manado : Universitas Sam Ratulangi, 2016).

²Badan Pusat Statistik, *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2010*, (Jakarta, 2011), h. 41.

dan modal manusia) dan inovasi teknologi. Kedua fungsi tersebut merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkembang didalam literatur teori pertumbuhan ekonomi.³ Sektor keuangan memberikan dampak pada sumber pertumbuhan dengan cara mempengaruhi tingkat tabungan (sisi penawaran dana) dan dengan merealokasikan tabungan ke dalam berbagai alternatif investasi (sisi permintaan dana), baik investasi modal fisik, investasi sumber daya manusia, maupun investasi teknologi.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sektor keuangan yang terdiri dari dua prinsip kerja yang berbeda, yaitu secara konvensional dan secara syariah. Kedua prinsip kerja sektor ini memiliki jenis kelembagaan yang sama, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Terkhusus pada sektor lembaga keuangan bank memiliki sistem implementasi berbasis *dual banking system*. Sistem ini merupakan izin bagi lembaga keuangan bank untuk melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan berbasis bunga dan berbasis syariah.⁴

Fenomena keuangan syariah telah menjadi bagian aktivitas ekonomi negara Indonesia selama kurang lebih dua dekade. Perkembangan tersebut dapat dianalisis melalui jumlah total aset dan institusi keuangan syariah yang terus tumbuh tiap tahunnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tahun 2019 total aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp 1.468,07 triliun, tumbuh 14,01% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.287,65 triliun. Sementara itu ditahun yang sama

³Supartoyo, dkk., *Pengaruh Sektor Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Perekonomian Regional Wilayah Sulawesi*, (Jakarta : Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2018).

⁴Maulana Hamzah, *Optimalisasi Peran Dual Banking System Melalui Fungsi Strategis JUB dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia*, Jurnal, Vol. 3, No, 2, (Bogor : Sekolah Tinggi Ekonomi TAZKIA, 2009), h. 199.

jumlah institusi keuangan syariah di Indonesia telah mencapai 455 unit, bertambah 19 unit dari tahun 2018 sebanyak 436 unit.⁵

Aspek utama kajian pada penelitian ini adalah berfokus pada bank umum syariah (BUS) dengan tiga indikatornya yang menjadi variabel penelitian yaitu total aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan selama tahun 2016-2019. Aspek penelitian ini dipilih diantara semua sektor keuangan syariah yang ada di Indonesia, perbankan syariah terutama BUS merupakan lembaga yang paling banyak berkontribusi pada total aset keuangan syariah, jika dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Menurut data OJK total aset perbankan syariah tahun 2019 telah mencapai Rp 538,32 triliun, sedangkan total aset lembaga keuangan lainnya hanya mencapai Rp 105,562 triliun. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diperoleh gambaran mengenai potensi perbankan syariah (BUS) yang jauh lebih besar dibandingkan potensi dari sektor keuangan lainnya terhadap perekonomian Indonesia.⁶

Sementara itu, pemilihan fokus tahun penelitian didasarkan pada beberapa momentum penting yang berkaitan dengan perbankan syariah. Pada 09 November 2016 adanya pendirian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi salah satu momentum yang menandai eksistensi dari sektor keuangan syariah yang semakin membaik. Tahun 2017 ekonomi syariah mengalami pertumbuhan yang agresif sebesar 15,9%, dan persentasi kemampuan perbankan syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah sebesar 4,12% lebih tinggi dari bank konvensional yang persentasinya hanya mampu mencapai 2,96%. Momentum penting perkembangan perbankan syariah pada tahun 2018 ditandai dengan adanya dorongan

⁵Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*, (Jakarta, 2019), h. 11.

⁶Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*, h. 13.

dan inisiasi KNEKS untuk pembentukan bank BUMN syariah besar, integrasi zakat, pendirian Bank Wakaf, serta konversi Bank Pembangunan Daerah NTB menjadi bank syariah. Sedangkan ditahun 2019, penerbitan Masterplan Ekonomi Syariah dan pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional juga memberikan momentum penting dari perkembangan dan kontribusi perbankan syariah bagi perekonomian Indonesia.

Adapun tiga indikator perbankan syariah yang menjadi variabel penelitian, dipilih karena merupakan bagian dari fungsi intermediasi yang terus menunjukkan trend positif. Data trend tersebut dapat dilihat pada data yang diterbitkan OJK mulai tahun 2016 dengan pertumbuhan total aset sebesar 20,28% (Rp. 365,7 triliun), DPK tumbuh 20,84% (Rp. 285,2 triliun), dan PYD tumbuh 16,41% (Rp. 254,4 triliun). Pada tahun 2017 pertumbuhan total aset perbankan syariah mencapai 18,97% (Rp. 435,02 triliun), DPK tumbuh 19,83% (Rp. 240 triliun), dan PYD tumbuh 15,24% (Rp. 355 triliun). Tahun 2018 total aset perbankan syariah kembali tumbuh 12,57% (Rp. 489,69 triliun), DPK tumbuh 11,41% (Rp. 379,96 triliun), dan PYD tumbuh 12,21% (Rp. 329,28 triliun). Sedangkan ditahun 2019 perkembangan total aset perbankan syariah mampu mencapai 9,93% (Rp. 538,32 triliun), DPK tumbuh 11,94% (Rp. 425,29 triliun), dan PYD tumbuh 10,89% (Rp. 365,13 triliun).⁷ Dari data tersebut menunjukkan bahwa BUS memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Trend positif pada perkembangan total aset, DPK, dan PYD secara teoritis dapat berperan pada pertumbuhan ekonomi melalui sektor moneter dan sektor riil. Meskipun tiga indikator tersebut terus mengalami pertumbuhan yang positif, namun

⁷Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*, h. 13.

pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami kondisi yang berfluktuatif. Fakta ini tercermin pada angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 mencapai 5,02%, 2017 (5,07%), 2018 (5,17%), dan turun menjadi 5,02% pada tahun 2019. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 berada pada peringkat keenam jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.⁸

Adanya permasalahan tersebut, salah satunya disebabkan oleh peran dari sektor keuangan yang belum optimal, terutama terkait penyaluran dana dari sektor keuangan ke sektor riil yang belum merata. Sehingga berpengaruh pada perkembangan sektor riil, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat dari porsi pembiayaan untuk tujuan konsumsi sebesar Rp. 161,66 triliun lebih tinggi dari porsi pembiayaan untuk modal kerja atau investasi yang hanya mencapai Rp. 114,99 triliun dan Rp. 88,48 triliun.⁹ Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih jauh mengenai pengaruh perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama empat tahun terakhir.

Penelitian ini termasuk salah satu penelitian yang umum dilakukan oleh para peneliti yang menganalisis mengenai peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun untuk memberikan kontribusi baru dari jenis penelitian yang umum, peneliti memberikan perbedaan melalui analisis tambahan sebagai kombinasi dari topik pembahasan penelitian. Jika penelitian lain pada umumnya hanya menganalisis hasil olah data secara kuantitatif untuk menjelaskan peran perbankan syariah, maka pada penelitian ini dikombinasikan dengan analisis fenomena ekonomi syariah yang

⁸Badan Pusat Statistik, *Pendapatan Nasional Indonesia 2015-2019*, (Jakarta) h. 78.

⁹Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*, h. 18.

terjadi pada tahun 2016-2019. Fenomena tersebut dirangkum untuk mendukung hasil olah data secara kuantitatif. Adapun secara sederhana tujuan ini untuk mengetahui pengaruh perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2016-2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Berapa besar total aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2019 ?
2. Berapa besar pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2016-2019 ?
3. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara total aset perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2016-2019 ?
4. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara dana pihak ketiga perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2016-2019 ?
5. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara pembiayaan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2016-2019 ?
6. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara total aset dengan dana pihak ketiga pada perbankan syariah tahun 2016-2019 ?
7. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan pada perbankan syariah tahun 2016-2019 ?
8. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara total aset dengan pembiayaan pada perbankan syariah tahun 2016-2019 ?

9. Adakah hubungan simultan yang positif dan signifikan antara total aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2016-2019 ?
10. Bagaimana pengaruh total aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2016-2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian, yaitu :

1. Menjelaskan besaran total aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2019.
2. Menjelaskan besaran pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2016-2019.
3. Menjelaskan hubungan antara total aset perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2016-2019.
4. Menjelaskan hubungan antara dana pihak ketiga perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2016-2019.
5. Menjelaskan hubungan antara pembiayaan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2016-2019.
6. Menjelaskan hubungan antara total aset dengan dana pihak ketiga pada perbankan syariah tahun 2016-2019.
7. Menjelaskan hubungan antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan pada perbankan syariah tahun 2016-2019.
8. Menjelaskan hubungan antara total aset dengan pembiayaan pada perbankan syariah tahun 2016-2019.
9. Menjelaskan hubungan simultan antara total aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2016-2019.

10. Menjelaskan pengaruh total aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2016-2019.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

- a. Diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis tentang ekonomi syariah, khususnya mengenai perbankan syariah.
- b. Mengembangkan kajian teoritis tentang perbankan syariah dan disesuaikan dengan kondisi aktual ekonomi.

2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat

Mempermudah pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah dan memberikan pertimbangan bagi mereka dalam proses pengambilan keputusan ekonomi (khususnya terkait keputusan menjadi nasabah).

- b. Bagi penulis

Penelitian ini adalah hasil elaborasi penulis terhadap pengetahuan teoritis selama menempuh kuliah sarjana IAIN Parepare, dengan fenomena ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Secara umum dapat menambah wawasan dan pengalaman pada kegiatan penelitian.

- c. Bagi pemerintah dan *stakeholder* terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan rujukan pemerintah ataupun lembaga perbankan syariah dalam pengambilan keputusan, kebijakan, dan program, khususnya terkait pengembangan lembaga.

d. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perbankan syariah, serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi syariah. Selain itu, dapat menjadi bahan pembandingan (penelitian terdahulu), khususnya pada penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif

